

PENANGANGAN KONFLIK KOMUNAL MELALUI METODE KOMUNIKASI SOSIAL

Sony Yusdarmoko¹ dan Rima Sari Indra Putri²

Abstract - Communal conflicts often occur in many areas in Indonesia. It disturbs and harms social security and harmony. In bigger escalation, it is a threat for national stability and coherence, as it may cause communal disintegration. Therefore, an active role of Indonesian Military Army (TNI) is needed to resolve conflict. The army's role is in relation with its territorial command function, implemented in the method of Social Communication Territorial Command. This writing uses the Theory of Social Communication and The Lederach Theory of Conflict Transformation which divide conflict resolution in three levels of method and actor. By referring to Lederach, this writing proposes that the Social Communication Territorial Command will be effective in resolving conflict if it is focused in the optimalisation of the third level role as it is directly affecting wider society. To optimizing their role, Babinsa, under the Command of Military should have knowledge of conflict resolution, and should possess good interpersonal and communication skills. In addition, there should be an adequate funding support to create social activities to engage parties involved in conflict. Most importantly, the effort to resolve communal conflict should be done comprehensively by involving relevant parties and institution.

Keywords: Communal Conflict, Social Communication, Territorial Command

Pendahuluan

Konflik komunal sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Konflik yang terjadi antar warga tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, semisal ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Konflik tersebut menyebabkan kerugian jiwa dan material yang tidak sedikit. Terlebih lagi, dampak dari konflik-konflik tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai, namun juga dirasakan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Selain itu, konflik komunal pada umumnya dilaksanakan secara terorganisir antar berbagai kelompok masyarakat dengan cara-cara yang anarkis dan destruktif. Hal tersebut tentu saja menyebabkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Dalam skala besar, konflik komunal dapat mengganggu stabilitas nasional dan berpotensi menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa. Hilangnya iklim investasi pada tataran makro

¹ Penulis adalah alumni Program Magister Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia, berpangkat Mayor dan saat ini bertugas sebagai Kasi Hartib Pomdam Jaya/Jayakarta.

² Penulis adalah alumni Program Magister Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia dan saat ini bekerja di Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan.

dapat menghambat pembangunan nasional. Potensi-potensi ancaman tersebut seharusnya dianalisa, dievaluasi dan dipetakan guna merumuskan tindakan pencegahan dan penanganan konflik sejak dini, sebelum konflik berkembang pada tingkat eskalasi lebih besar. Untuk itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib ikut serta dalam upaya penanganan konflik komunal di tengah masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang rasional dan proporsional.

Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama Pertahanan Negara memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³ Tugas yang diamanatkan tersebut dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam konteks OMSP, pencegahan dan penanganan konflik komunal tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan militer (walaupun dilakukan oleh institusi militer). Untuk mencegah konflik meluas dan merugikan lebih banyak pihak, diperlukan berbagai upaya preventif dan persuasif yang jauh lebih efektif dan memiliki dampak jangka panjang ketimbang upaya represif. Pendekatan, pencegahan dan penanganan konflik komunal oleh TNI harus mengedepankan upaya preventif dan persuasif guna mendapatkan simpati, memenangkan hati dan pikiran masyarakat (*wining people's hearts and minds*). Namun, penting diingat bahwa upaya tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan melihat permasalahan dari akarnya (*root causes*), termasuk meninjau dari berbagai dimensi persoalan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu, upaya pencegahan dan penyelesaiannya pun harus dilaksanakan dengan koordinasi berbagai pihak (*interagency coordination/cooperation*).

Salah satu bentuk tugas Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan TNI adalah “Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”. Kemudian, tercantum pula di Pasal 8, bahwa salah satu tugas Angkatan Darat (TNI AD) adalah “Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat”.

³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Upaya pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dilakukan dengan cara Pembinaan Teritorial (Binter). Binter yang dilakukan TNI AD adalah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AD.⁴ Dalam lingkup Pembangunan Nasional, fungsi Binter diarahkan untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan Pembangunan Nasional, dan mewujudkan ketahanan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dalam rangka Ketahanan Nasional.⁵

Pada pelaksanaannya, Binter dilaksanakan dengan tiga metode, yakni Metode Komunikasi Sosial, Metode Binwanwil dan Metode Bhakti TNI. Komunikasi Sosial (Komsos) dalam kegiatan Binter adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD guna menyampaikan pikiran dan pandangannya terkait pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya; serta membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Pada tulisan ini, penulis akan mengulas mengenai Metode Komunikasi Sosial Bina Teritorial (Komsos Binter) TNI dalam upaya penanganan konflik komunal yang kerap terjadi di Indonesia. Beberapa Teori Konflik dan Penanganan Konflik juga akan digunakan dalam analisa dan pembahasan.

Teori Konflik dan Penanganan Konflik

Sebelum membahas tentang “Komunikasi Sosial dalam Upaya Penanganan Konflik Komunal”, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai Teori Konflik dan Penanganan Konflik. Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab konflik, seperti Teori Hubungan Masyarakat, Teori Negosiasi Prinsip, Teori Kebutuhan Manusia, Teori Identitas,

⁴ Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial, disahkan dengan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/384/X/2002.

⁵ *Ibid.*

Teori Kesalahpahaman Antar Budaya dan Teori Transformasi Konflik.⁶ Teori Hubungan Masyarakat berbicara tentang polarisasi, ketidakpercayaan dan permusuhan antara dua atau lebih kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Teori Negosiasi Prinsip melihat konflik sebagai posisi pandangan yang tidak selaras. Teori Kebutuhan Manusia melihat konflik dari tidak terpenuhinya atau terhalangnya kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental maupun sosial (khususnya keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi). Teori Identitas melihat konflik karena adanya identitas yang hilang atau terancam. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya menganggap ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi, antara berbagai kelompok budaya, dapat menyebabkan konflik. Yang terakhir, Teori Transformasi Konflik berangkat dari adanya isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial maupun budaya.⁷ Keenam teori di atas pada hakikatnya berbicara tentang konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dan persepsi budaya; yang dapat terjadi manakala tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok saling bertabrakan.

Yang tidak kalah penting, banyak fakta menunjukkan bahwa konflik-konflik komunal pada umumnya mengedepankan perbedaan etnosentris, di mana kesukuan dan identitas primordialisme kelompok menjadi faktor utama pemicu konflik. Terlokalisirnya etnis tertentu yang menciptakan identitas budaya primordial sempit. Konflik-konflik semacam ini cenderung berlarut. Terdapat ketakutan-ketakutan yang mendorong individu untuk menguatkan identitas kelompok mereka (*collective fear*), sehingga terbentuk konsep siapa kawan dan siapa lawan. Solidaritas kelompok menjadi kuat ketika etnis atau kelompoknya mendapatkan ancaman dari luar.

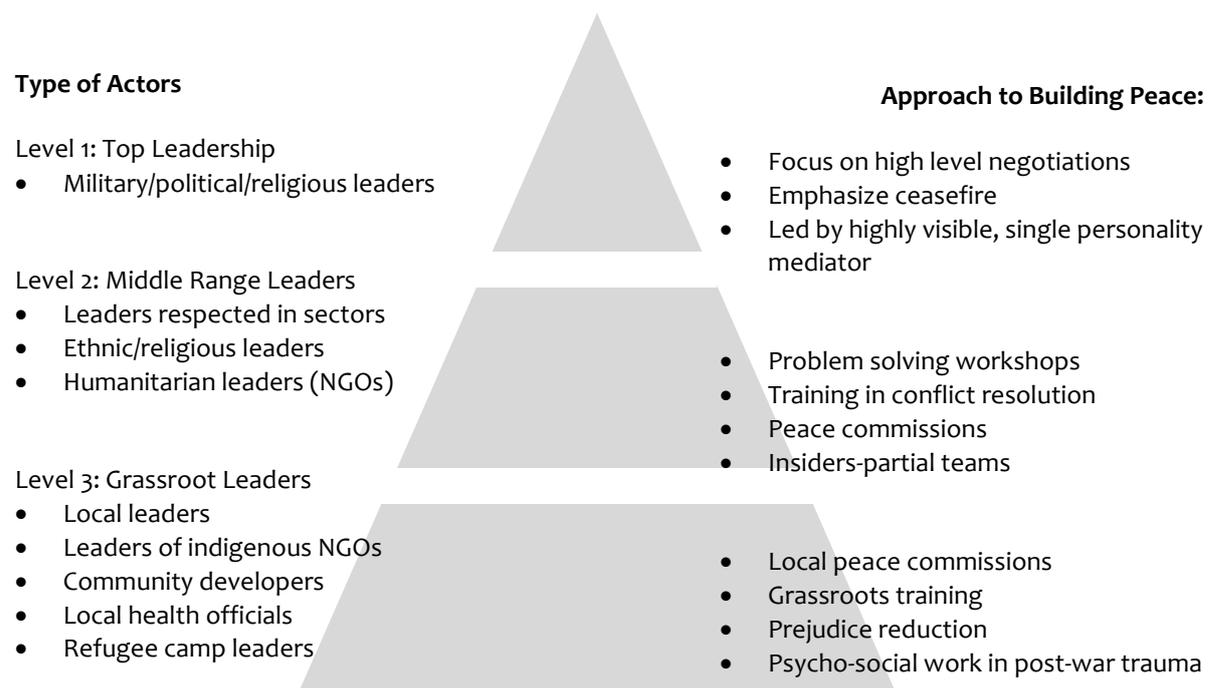
Konflik-konflik yang terjadi memerlukan upaya penanganan yang tepat. Terdapat berbagai Teori dan Metode Penanganan konflik, diantaranya: Resolusi Konflik dan Transformasi Konflik. Pendekatan Resolusi Konflik memberi perhatian besar untuk menjawab tantangan ganda, yakni menghilangkan akar-akar pertikaian (*root causes of conflicts*) seraya memperbaiki hubungan yang porak poranda (*damaged relationship*)

⁶ Fisher dkk, dalam Thung Ju Lan, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Masalah Konflik Sosial*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001).

⁷ Thung Ju Lan, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Masalah Konflik Sosial*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001).

antar pihak yang terjerumus dalam pertikaian dalam waktu lama.⁸ Sedangkan Transformasi Konflik mengupayakan untuk menjangkau tidak hanya aktor yang terlibat dalam konflik, melainkan juga ruang di mana mereka berada. Transformasi bertujuan untuk membetuk masyarakat baru yang tidak lagi membawa beban masa lalu, selain membangun koherensi untuk membangun masa depan.⁹ Menurut Kusnanto Anggoro, kedua pendekatan penanganan konflik di atas harus dilakukan secara simultan, dimana Resolusi Konflik berupaya untuk mengidentifikasi akar permasalahan (*root causes*) dan Transformasi Konflik berupaya untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus melakukan perubahan-perubahan yang dapat mengeliminasi akar konflik melalui pendekatan-pendekatan psikologis di level *grassroots*.¹⁰

Terdapat suatu model Transformasi Konflik yang menarik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach, seorang Professor Perdamaian Internasional dari Amerika Serikat seperti yang tergambar dalam ilustrasi berikut :



Gambar 1. Model Transformasi Konflik Lederach.

⁸ Kusnanto Anggoro, *Post Conflict Peace Building*, (Jakarta: Propatria, 2009).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa Penanganan konflik dengan pendekatan transformatif dilakukan melalui berbagai lapisan. Lapisan atas berupaya melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang bertikai dengan beberapa cara berikut, yaitu: berfokus pada negosiasi para pemegang kebijakan tertinggi, mengupayakan gencatan senjata, upaya-upaya mediasi yang digerakkan oleh tokoh nasional dan internasional berpengaruh. Upaya-upaya tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemimpin tertinggi militer, politik atau agama.

Kemudian pada Lapisan tengah, upaya penyelesaian konflik dilaksanakan melalui *workshop* pemecahan dan penanganan masalah, *training* resolusi konflik, atau pembentukan komisi perdamaian. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemimpin masyarakat di level menengah, semisal pemimpin wilayah di berbagai sektor, tokoh agama, peneliti, tokoh akademis, atau LSM.

Yang terakhir, pada lapisan ketiga, pendekatan langsung dilakukan pada masyarakat lapisan bawah, melalui: pembentukan komisi perdamaian lokal, *training* di level akar rumput, upaya mereduksi prasangka (*prejudice*) di tengah-tengah masyarakat, serta kegiatan keja *psycho-social* pasca konflik untuk mereduksi atau menghilangkan trauma.

Metode Komunikasi Sosial Bina Teritorial

Komunikasi Sosial (Komsos) adalah proses interaksi antar individu dan kelompok, dalam masyarakat, yang memungkinkan terjadinya pertukaran pesan atau hasil budaya manusia, berupa bahasa, adat istiadat/tradisi, ilmu pengetahuan dan sistem nilai yang dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat, secara sepihak atau kedua belah pihak.¹¹ Dalam pengertian lebih sempit, Komunikasi Sosial dalam kegiatan Bina Teritorial (Komsos Binter) adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD guna menyampaikan pikiran dan pandangannya terkait pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat.

¹¹ Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial, disahkan dengan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/384/X/2002.

Sebagai metode, Komsos adalah suatu cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD, yang berhubungan dengan perencanaan dan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan segenap komponen bangsa, guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan, yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepentingan pertahanan negara. Lebih lanjut, Komsos, sebagai salah satu metode Binter, dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh satuan jajaran TNI AD, guna membangun pemahaman dan pengertian terkait kepentingan bersama, serta dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.¹²

Dalam konteks kemampuan prajurit, Komsos adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh prajurit TNI AD untuk berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah guna mewujudkan rasa saling pengertian dan kebersamaan, sehingga timbul keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepentingan bidang pertahanan negara.

Pengertian Komsos, baik sebagai metode maupun yang merujuk pada kemampuan prajurit, selalu ditujukan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Kepentingan Pertahanan Negara tidak hanya dimaksudkan untuk menghadapi berbagai ancaman luar negeri, namun juga dalam negeri. Sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, yang menyatakan bahwa Pertahanan Negara adalah salah satu fungsi pemerintahan negara yang diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan dari luar maupun dalam negeri.¹³

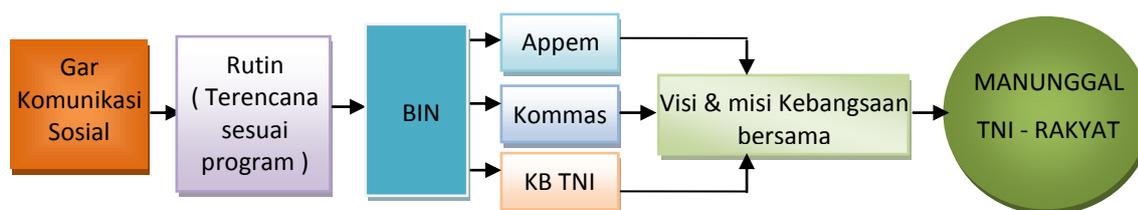
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Komsos adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pertahanan Negara, meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam rangka memantapkan Ketahanan Wilayah, serta meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program Bakti TNI. Komsos juga diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara komponen bangsa dengan aparat di wilayah, termasuk memperkuat jalinan komunikasi dan koordinasi antara satuan TNI AD dengan instansi-instansi terkait di wilayah. Selain itu,

¹² *Buku Pedoman Sementara Penyelenggaraan Komunikasi Sosial TNI AD*, (Jakarta: STERAD, 2011).

¹³ *Buku Putih Pertahanan Negara*, (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2008).

Komsos dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai kepentingan negara yang tentunya telah dikoordinasikan melalui Markas Besar TNI. Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan Komsos tidaklah kaku (*rigid*). Komsos yang diselenggarakan di tiap wilayah dilakukan dengan memperhatikan hakikat ancaman yang berlaku di wilayah tersebut.

Berdasarkan Buku Pedoman Sementara Komunikasi Sosial TNI AD, Mekanisme penyelenggaraan Komsos terbagi dua, yakni penyelenggaraan “Komunikasi Sosial Rutin” untuk pembinaan dan “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial insidentil” untuk mencegah/meminimalisasi suatu kondisi. Tujuan Penyelenggaraan Komsos Rutin adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemahaman Bela Negara, serta mencegah timbulnya pengaruh negatif yang dapat melunturkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Kegiatan ini memiliki sasaran terciptanya wilayah yang kondusif tanpa terpengaruh oleh perbedaan SARA, terwujudnya pemahaman bagi seluruh komponen bangsa bahwa Bela Negara merupakan kewajiban setiap warga Negara, terciptanya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan di daerah, serta terciptanya kemanunggalan antara TNI dengan seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaraan Komsos Rutin dapat dimanfaatkan untuk menyuarakan persatuan dan kesatuan sekaligus upaya pengumpulan keterangan akan situasi yang berkembang di wilayah tertentu. Kegiatan Komsos Rutin dapat digambarkan sebagai berikut :

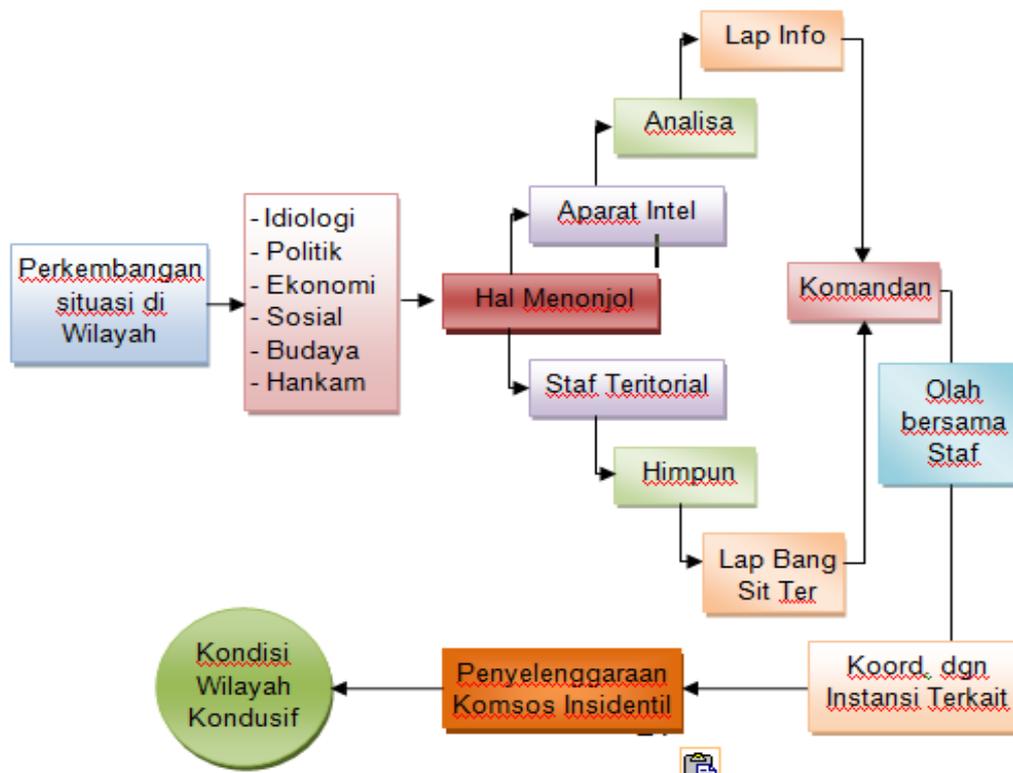


Gambar 2. Komunikasi Sosial Rutin Untuk Pembinaan¹⁴

Sedangkan Komsos Insidentil untuk mencegah/meminimalisasi suatu kondisi bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial di lingkungan masyarakat, mencegah luntarnya budaya daerah (degradasi budaya), serta menjaga dan selalu mengangkat kearifan lokal di wilayah. Apabila ada indikasi hal-hal yang dapat membahayakan keamanan, maka

¹⁴ Buku Pedoman Sementara Penyelenggaraan Komunikasi Sosial TNI AD, (Jakarta: STERAD, 2011).

Komsos Insidentil dimaksudkan untuk pencegahan atau meminimalisasi resiko. Kegiatan Komsos Insidentil dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Insidentil untuk Mencegah/Meminimalisasi Suatu Kondisi¹⁵

Metode Komunikasi Sosial Bina Teritorial Dalam Upaya Penanganan Konflik Komunal

Selain sebagai Satuan Tempur, TNI-AD juga memiliki fungsi satuan kewilayahan. Fungsi tersebut terimplementasi dalam kegiatan Bina Teritorial (Binter), yang dipandang penulis efektif dalam upaya penanganan konflik. Binter adalah salah satu upaya TNI AD untuk membantu pemerintahan daerah dalam menciptakan ketahanan nasional, mengingat konflik tidak hanya mengancam keamanan, namun juga menimbulkan eksek terhadap keberlangsungan pembangunan nasional.

Telah disebutkan bahwa pada Kegiatan Binter melekat tiga metode, yakni: Metode Komunikasi Sosial, Binwanwil, dan Bhakti TNI. Menurut penulis, Metode Komsos dipandang paling efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik, karena metode ini bersifat “*bottom-up approach*” dengan penggalangan partisipasi masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*

Hal ini penting karena pada kenyataannya, upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik yang hanya berfokus pada pendekatan “*top-bottom approach*” hanya menyisir kalangan atas atau tertentu, lama mencapai tataran akar rumput, dan memiliki pengaruh terbatas. Pendekatan pada level terbawah justru memiliki tingkat efektivitas pencegahan serta penanganan konflik yang tinggi karena dapat mempengaruhi masyarakat dalam jumlah yang besar. Perlu diingat bahwa masyarakat pada lapisan bawahlah yang paling mudah terpicu dalam konflik komunal.

Komunikasi Sosial (Komsos), sesuai Bujuknik Komsos Nomor Skep/480/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Komsos, dilaksanakan dengan metode seminar, pidato, ceramah, dialog, sosialisasi dan penyuluhan. Selain itu juga dilaksanakan secara aplikatif di lapangan dalam bentuk anjungsana/silaturahmi, kegiatan olahraga dan seni budaya adat istiadat/budaya daerah setempat, serta audiensi media elektronik dan cetak.

Fungsi Komando Komsos sejatinya telah melekat sebagai tugas pokok personil TNI-AD. Selain itu, merupakan tugas aparat TNI-AD, baik di tingkat wilayah dan lokal untuk mampu membaca situasi dan potensi konflik, memediasi konflik, atau menggagas kegiatan-kegiatan *workshop/training* psiko-sosial dalam hal pemecahan masalah, resolusi konflik, reduksi trauma pasca konflik atau kegiatan sosial lain yang mendukung terciptanya situasi aman dan tertib. Upaya-upaya deteksi, pencegahan dan penanganan konflik tersebut memerlukan optimalisasi fungsi Komsos.

Merujuk pada Teori Transformasi Konflik Lederach yang menjabarkan tentang aktor serta metode penanganan, kegiatan Komsos Binter TNI-AD dapat dilaksanakan pada 3 lini kepemimpinan, di tingkat atas, menengah dan bawah

Dalam penyelenggaraan Komsos, organisasinya melekat pada fungsi Komando Kewilayahan TNI AD. Jika terjadi konflik atau potensi eskalasi konflik kemungkinan membesar, di level kepemimpinan teratas, Komsos Binter TNI-AD akan berfokus untuk membangun negosiasi dengan para pimpinan tertinggi di tingkat provinsi. TNI-AD di bawah kepemimpinan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam), akan berkoordinasi dengan Gubernur, pemimpin politik serta agama. Kegiatan Komsos Binter rutin dilaksanakan dengan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), sedangkan Kegiatan Komsos Binter insidentil yang bersifat untuk menguatkan kondisi kondusif saat gencatan

senjata adalah dengan upaya pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial lainnya di bawah koordinasi Kodam.

Di level menengah, Kegiatan Komsos Binter dibawah komando dan koordinasi Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) yang berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya, seperti pengamat, akademisi dan LSM.

Di level bawah, Kegiatan Komsos Binter dibawah komando dan koordinasi Komandan Komando Rayon Militer (Koramil). Koramil membawahi BABINSA (Bintara Pembina Desa) yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan paling mengenal wilayah serta karakteristik populasi desa. Merujuk pada piramida Lederach, pendekatan penanganan konflik yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat paling luas ada di level ketiga atau terbawah. Oleh karena itu, metode penanganan konflik komunal, dipandang oleh penulis, jauh lebih efektif dan efisien, serta berdampak lebih luas di masyarakat jika Kegiatan Komsos Binter dilakukan di level ketiga. *Mengapa ?*

Upaya penanganan konflik tidak bisa hanya menggunakan pendekatan keras (*hard approach*), semisal penegakan hukum, cara-cara militeristik, dan lain-lain. Pendekatan represif hanya dilakukan ketika upaya preventif dirasa kurang efektif. Penegakan hukum, misalnya, memang dapat menyelesaikan permasalahan, namun cenderung tidak dapat masuk di hati dan pikiran pihak-pihak masyarakat yang bertikai di level terbawah. Penegakan hukum belum tentu dapat menjangkau akar permasalahan konflik. Untuk dapat mencapai level terbawah, diperlukan kemampuan personil untuk mendekati dan menarik simpati masyarakat, dari kedua belah pihak, agar dapat bersama-sama mengupayakan perdamaian. Babinsa, dibawah Koramil, sebagai aparat kewilayahan TNI-AD, memiliki tugas dan fungsi untuk berada di tengah-tengah masyarakat, mendeteksi, membaca situasi dan potensi konflik, menggali informasi, serta terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik komunal di masyarakat, semisal: membangun kerjasama dan memediasi pertemuan dengan aparat desa dan pihak terkait.

Jika terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, hukum harus ditegakkan. Oknum kedua belah pihak yang bertikai dan terbukti bersalah harus dihukum secara adil, sehingga tidak menimbulkan perasaan “tebang pilih”, yang dapat memicu permasalahan baru. Kemudian, identifikasi dan reduksi akar permasalahan dapat dilakukan dengan

menggagas pendekatan, pertemuan, dan diskusi dengan berbagai tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda guna mengkampanyekan penyelesaian konflik. Jika situasi telah kondusif, dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat kedua belah pihak hadir, sekaligus merasa gembira seperti lomba kesenian maupun olah raga.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Komsos tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh TNI AD. Diperlukan keterlibatan, komitmen, upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat antara *stakeholders* terkait, seperti Pemda, Polri, Akademisi, LSM termasuk media. Terhadap suatu wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, harus dibuatkan strategi-strategi tertentu dimana satuan komando kewilayahan harus aktif menyesuaikan metode Komsos Binter dengan situasi dan karakteristik wilayah.

Kegiatan Komsos Binter, pada kenyataannya di lapangan, tidaklah mudah. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Selain itu, personil TNI-AD juga dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai resolusi konflik. Mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan inter-personal yang baik, yang dapat dimanfaatkan ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus pihak-pihak lain yang terkait. Dana, pengetahuan dan kemampuan komunikasi adalah tiga elemen terpenting sehingga metode Komsos Binter oleh Babinsa dapat optimal untuk menangani konflik.

Kesimpulan

Konflik komunal yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Eskalasi konflik yang membesar, bisa mengakibatkan instabilitas dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu diperlukan peran serta TNI untuk mengatasi berbagai konflik komunal yang muncul. Peran serta TNI, terkait dengan fungsi komando kewilayahan TNI yang terimplementasikan dalam metode Komsos Binter. Jika Teori Lederach memaparkan tentang tiga lapisan Transformasi Konflik, maka penulis memandang bahwa penanganan konflik oleh TNI-AD akan efektif jika peran Koramil dan Babinsa dalam Komsos Binter dioptimalkan di level ketiga, terbawah karena lebih dekat dan lebih luas jangkauannya di masyarakat. Peran Koramil dan Babinsa tidak hanya untuk penanganan, namun sebelumnya harus dapat mendeteksi, menggali informasi sekaligus mencegah konflik terjadi. Agar optimal, unit terkecil TNI-AD harus

memiliki personil-personil yang dilengkapi pengetahuan dan wawasan resolusi konflik, serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Selain itu, kecukupan dana untuk melakukan kegiatan. Yang terpenting adalah bahwa upaya penanganan konflik komunal harus dilakukan secara komprehensif, bersama-sama dan berkesinambungan dengan pihak terkait lainnya.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Kusnanto. 2009. *Post Conflict Peace Building*. Jakarta: Propatria.
- Buku Pedoman Sementara Penyelenggaraan Komunikasi Sosial TNI AD. 2011. Jakarta: STERAD.
- Buku Putih Pertahanan Negara. 2008. Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial, disahkan dengan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/384/X/2002.
- Fisher dkk, dalam Thung Ju Lan. 2001. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Masalah Konflik Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Ju Lan, Thung. 2001. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Masalah Konflik Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

